BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari daratan yang berjumlah 1.922.570 Km², perairan 3.257.483 Km². Jika dilihat secara keseluruhan maka total wilayah Indonesia sekitar 5.180.053 km², hal ini sesuai dengan data serta informasi yang di sampaikan Oleh Badan Informasi Geospasial.¹ Dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan ideologinya yang sangat beragam, yang mana Indonesia itu sendiri sangat menghargai perbedaan tersebut, sehingga dengan keberagaman perbedaan Indonesia dijuluki sebagai negara Multikultural yang didorong oleh faktor banyaknya jumlah penduduk di Indonesia itu sendiri, karena dalam hal ini di Indonesia sendiri banyak keberagaman atau heterogen seperti hal- nya dari segi etnis, agama, dan juga budaya. Berdasarkan data tersebut juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat seperti halnya beragamnya etnis, budaya, dan kebiasaan, dalam hal lain juga berdampak pada ragamnya hasil budi daya hayati dan nabati.

Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi aset nasional diwilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Intellectual Property Rights (Hak Kekayaan Intelektual) yakni hak yang timbul bagi

¹ Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, "Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 26.

hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.² Salah satu jenis HKI yang memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah dimana produk itu berasal adalah Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.³

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi dari kedua faktor tersebut, yang memberi ciri dan kualitas tertentu terhadap barang yang dihasilkan. Indikasi Geografis secara internasional disepakati dalam TRIPs. Pasal 22 TRIPs menyebutkan bahwa *Geographical Indications are, ..., Indication which identity a good as originating in the territory of a member, or a region a locality in that territory, where given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*⁴ Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis

² Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 7, 2015, hal. 43.

³ Ananto Setyo Utomo, "*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas di Kabupaten Situbondo*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jember, Jember, 2019, hal. 1.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Individual*, Ed. 1 Cet. 2, Sinar Grafika. Jakarta, 2013, hal. 151.

termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Walau begitu, karakteristik suatu produk Indikasi Geografis tidak selalu dipengaruhi oleh faktor alam. Faktor campuran manusia pun bisa menentukan kekhasan suatu produk, misalnya kerajinan Batik Jawa.⁵

Sama halnya seperti pemegang Hak Merek, pemegang Hak Indikasi Geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan Indikasi Geografis yang sama. Pelanggaran terhadap peraturan ini juga menyebabkan pemegang Hak Indikasi Geografis dapat menuntut kerugian dari pihak lain. Perbedaannya dengan Hak Merek yang bisa dimiliki secara perorangan, kepemilikan Hak Indikasi Geografis tidak bersifat individualis semata. Indikasi Geografis lebih bersifat komunalistik, yang berarti kepemilikannya secara bersama oleh penduduk di suatu daerah tertentu. Namun untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga yang berwenang. Pendaftaran tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM.⁶

Indikasi geografis sebagai hak kolektif yakni hak bersama di kalangan masyarakat untuk dimanfaatkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat, yang secara sosiologis, kepentingan bersama masyarakat di daerah atau kawasan geografis, kepentingan bersama masyarakat di daerah atau kawasan geografis tertentu oleh karena potensi dan sebaran sumber daya alam antardaerah bahkan antarnegara tidak sama. Upaya mengangkat potensi sumber daya alam menjadi

⁵ *Ibid*, hal. 152.

⁶ *Ibid*.

potensi bisnis atau komersial adalah hal setiap anggota dan kelompok masyarakat untuk memperjuangkannya.

Menurut Suyud Margono, adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya.⁷

Membahas mengenai Indikasi Geografis pada dasarnya tidak lepas dari kajian mengenai merek. Ada beberapa pengertian dari merek, salah satunya adalah Menurut H.M.N Purwo Sutjipto yaitu: “Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.⁸ Sedangkan pengertian lain tentang merek menurut Drs. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu; “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya. Oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai; tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”⁹

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang

⁷ Claudia Christy Ester Kanter, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Indikasi Geografis menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016”, *Lex Administratum*, Vol. 7 No. 4, 2019, hal. 12.

⁸OK Saidin, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. Revisi, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 455.

⁹*Ibid*, hal. 456.

memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Tabel 1 Perbedaan Secara Umum Antara Merek dan Indikasi Geografis:¹⁰

No.	Keterangan	Merek	Indikasi Geografis
1	Definisi/Pengertian	Adalah sebuah tanda atau nama yang merupakan hasil kreasi intelektual dan dipergunakan pada barang atau jasa	Adalah nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk tersebut.
2	Sifat	Merek tidak menunjukkan kualitas produk	Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi, dan karakteristik suatu produk
3	Pemilik	Merek dimiliki oleh perorangan atau perusahaan	Indikasi geografis dimiliki secara komunal
4	Jangka waktu perlindungan	Merek mempunyai jangka waktu perlindungan	Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan. Atau

¹⁰ Winda Risna Yessiningrum, "Op. Cit., hal. 45.

			perlindungan Indikasi geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis.
5	Eksplorasi	Merek dapat diperjualbelikan atau dilisensikan	Indikasi geografis tidak dapat diperjualbelikan/dilisensikan

Upaya perlindungan indikasi geografis di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik saat ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah menempatkan perlindungan Indikasi Geografis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan merek. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memuat ketentuan mengenai Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Pada Bab tersebut dijelaskan bahwa mengenai “Indikasi Geografis yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan” merupakan awal daripada payung hukum produk yang ter-

indikasi tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, namun Ketentuan Indikasi Geografis dinilai belum mampu menjelaskan tentang secara rinci perlindungan Indikasi Geografis. Kekosongan tersebut kemudian dilengkapi melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berharap bahwa perlindungan Indikasi Geografis menjadi lebih kuat di Indonesia. Upaya perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia didapatkan melalui sistem pendaftaran.

Perlindungan hukum internasional Indikasi Geografis yang terbaru dapat kita temukan pada *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*(TRIPs) yang ditandatangani pada Putaran Uruguay *General Agreement On Tarifs and Trade* tahun 1994. TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis.¹¹ Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi ciri khas tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak semestinya sekaligus memberi peluang pada masyarakat sekitar untuk memperoleh hasil yang maksimal

¹¹ Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional", *Lex Jurnalica* Vol. 15 No. 2, 2018, hal. 196.

dari produk ciri khas wilayah tersebut.¹² Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena dapat memberi jaminan kualitas suatu produk khas wilayah. Maka dari itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum.

Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga saat ini Indikasi Geografis yang terdaftar baru sebanyak 108.¹³ Hal ini tentu bertolak belakang dengan banyaknya potensi sumber daya alam geografis Indonesia yang melimpah. Pemahaman masyarakat yang kurang akan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis menjadi salah satu faktor sulitnya penegakan hukum, karena banyak produk yang sudah dikenal namun belum didaftarkan, sementara yang dilindungi payung hukum adalah produk yang telah terdaftar. Selain pemahaman masyarakat yang kurang, peran Pemerintah Daerah yang kurang memberi perhatian juga menjadi salah satu penyebab Indikasi Geografis kurang dipahami masyarakat pada umumnya. Kebanyakan masyarakat cenderung mengenal istilah HKI hanya sebatas Paten dan Merek.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis sangat penting karena akan mencegah berbagai pelanggaran terhadap pemakaian nama dan produk indikasi geografis seperti beberapa kasus yang pernah dialami bangsa ini, hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus mengenai pelanggaran Indikasi Geografis yang dapat menjadi pelajaran, yaitu kasus pelanggaran Kopi Toraja dan

¹² Ibnu Rizal, "Perlindungan Hukum Kopi Liberika Rangsang Meranti Sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Kepulauan Meranti," *Jurnal Equitable*, Vol. 5 No. 1, 2020. hal. 4.

¹³ <https://ig.dgip.go.id/>, Diakses pada tanggal 22 April 2022.

Kopi Gayo. Kasus pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh Key Coffee Co. dimulai pada saat pemilik merek “Toarco Toraja” tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 1976. Sedangkan kasus kedua yaitu kasus Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang hak yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda tersebut (Holland Coffe B. V) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar didunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee. Jika kasus pendaftaran merek atas Indikasi Geografis sudah terjadi lama, tentu penyelesaian ini tidak akan cukup jika menggunakan ketentuan domestik saja, hal tersebut tentu harus mengacu pada instrumen internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁴

Di Indonesia kopi merupakan salah satu produk Indikasi Geografis karena setiap daerah perkebunan kopi memiliki cita rasa berbeda-beda. Hal ini juga dipengaruhi kondisi alam berbeda-beda yang menjadi dasar perbedaan cita rasa kopi tersebut. Salah satu produk Indikasi Geografis yang ada di Indonesia adalah Kopi Liberika Tungal. Kopi Liberika Tungal merupakan kopi jenis liberika yang

¹⁴ Muhammad Ali Ridla, “Perlindungan Indikasi Geografis Kopi yang Belum Terdaftar Menurut First-to-Use System”, *Jurnal Hukum Bisnis Hukum Commune*, Vol. 2 No. 2, 2019, hal. 117.

pertama kali dikembangkan oleh Haji Sayuti di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Benih diperoleh dari kebun kopi di Malaysia pada Tahun 1940 dan dikembangkan secara meluas pada tahun 1979 – 1980 an. Namun penamaan Kopi Liberika sendiri baru ditetapkan pada tahun 2010 an, sebelumnya para petani Kopi Liberika menyebutnya sebagai Kopi Gede (Besar) karena bentuk buah dari kopi ini berukuran besar jika dibandingkan dengan jenis kopi lain yang lebih kecil.¹⁵

Menurut Keterangan Ketua MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) yang memperjuangkan dan riset Kopi Liberika Tungkal, Nama Kopi Liberika baru disematkan saat MPIG melakukan pengajuan, dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan varietas kopi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nama Kopi Liberika Tungkal komposit. Dan nama Kopi Liberika Tungkal resmi digunakan berdasarkan pengakuan Hak Paten dan Sertifikat Indikasi Geografis dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kepada kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) pada 2014 yang lalu. Didukung dengan aspek mutu yang baik dan citarasa kopi yang unik, membuat kopi ini terkenal di pasar kopi domestik maupun luar negeri khususnya Malaysia. Hal ini juga membuat harga Kopi Liberika Tungkal lebih mahal dari jenis arabika maupun robusta.¹⁶

Jenis kopi yang dapat memperoleh perlindungan hukum adalah kopi yang mendeskripsikan bagaimana kopi tersebut ditanam, diproses pasca panen hingga

¹⁵ <http://jambi.litbang.pertanian.go.id/eng/images/PDF/14leafpanenkopi.pdf> , Diakses pada tanggal 23 April 2022.

¹⁶<https://jambi.tribunnews.com/2022/03/12/kopi-liberika-tungkal-komposit-kopi-khas-kabupaten-tanjung-jabung-barat>, Diakses pada tanggal 22 April 2022.

diracik menjadi minuman kopi spesial. Istilah *specialty coffee* di populerkan oleh seorang wanita bernama Erna Knutsen pada tahun 1974, istilah tersebut untuk menyebut biji kopi dengan rasa terbaik yang dihasilkan dari daerah beriklim mikro istimewa.¹⁷

Nilai khusus dari suatu daerah dapat ditingkatkan di mata pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Sebagai Indikasi Geografis yang terdaftar di provinsi Jambi, Kopi Liberika Tungkal banyak sekali mengalami permasalahan yang terjadi, permasalahan utama tidak adanya perlindungan hukum terhadap pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan pemakai Indikasi Geografis terdaftar, memberikan perlindungan dalam konteks pembinaan sosialisasi, kurang efektifnya bantuan dari pemerintah daerah berupa bibit tanaman kopi dan bantuan alat pertanian yang kurang menyeluruh kepada para petani dan juga pengawasan kepada petani yang tidak memenuhi dokumen deskripsi Indikasi Geografis.¹⁸

¹⁷ M. Rangga Yusuf dan Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol. 7 No. 2, 2019, hal. 220.

¹⁸ <https://jambi.antaranews.com/berita/316543/petani-kopi-liberika-minta-pemerintah-bantu-pemasaran>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

Kurangnya perlindungan optimal terhadap Indikasi Geografis menjadi suatu masalah yang harus segera diselesaikan, karena Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi terkait Indikasi Geografis. Namun belum sepenuhnya masyarakat luas memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Fungsi dari perlindungan hukum bukan hanya sebatas pendaftaran ataupun pemberian sertifikasi saja melainkan Indikasi Geografis dapat pula meningkatkan dan mempertahankan kualitas maupun karakteristik produk sehingga diperlukan perlindungan dari pembajakan atau pemalsuan dalam wujud penuntutan gugatan ganti rugi maupun dalam bentuk pidana.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul **“Perlindungan Pemanfaatan Hak Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Liberika Tungkal di Tanjung Jabung Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemanfaatan hak Indikasi Geografis Kopi Liberika Tungkal ?
2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Liberika Tungkal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Liberika Tungal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum penggunaan Indikasi Geografis Kopi Liberika Tungal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dan penulisan proposal ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dibidang Indikasi Geografis ditinjau dari segi hukum.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang Indikasi Geografis dimasa mendatang
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi solusi dalam mengatasi permasalahan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari terjadinya penafsiran atau interpretasi yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka menjadi penting untuk diuraikan pengertian kata atau istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut C.S.T. Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara pikiran dari berbagai macam ancaman dan gangguan dari pihak manapun.¹⁹

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak Kekayaan Intelektual biasa pula disingkat dengan HKI.²⁰

3. Indikasi Geografis

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.

4. Kopi Liberika Tungkal

Kopi Liberika Tungkal komposit berasal dari kopi jenis liberika yang dikembangkan pertama kali oleh Haji Sayuti di Kelurahan Mekar Jaya,

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 102.

²⁰ <http://lemlit.trisakti.ac.id/>, Diakses pada tanggal 22 April 2022

Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Benih diperoleh dari kebun kopi di Malaysia pada tahun 1940 -an dan dikembangkan secara meluas pada tahun 1979 – 1980 -an. Seleksi massa positif dilakukan pada populasi dasar kopi Liberika generasi I dan II turunan pohon induk Haji Sayuti untuk mendapatkan populasi pohon terpilih sebagai genepool potensial.²¹

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

²¹ <http://jambi.litbang.pertanian.go.id/eng/images/PDF/14leafpanenkopi.pdf>, Diakses pada tanggal 23 April 2022.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴

Lili Rasjidi dan LB Wya Putra menyatakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁵

Dari uraian para ahli diatas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Pengawasan

²³ *Ibid*, hal. 69.

²⁴ *Ibid*, hal. 54.

²⁵ Lili Rasjidi dan LB Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993. hal. 118.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁶ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan sebenarnya dari apa yang diawasi”.²⁷

Menurut Prayudi, “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan”.²⁸

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern serta mendorong adanya pengawasan masyarakat. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

²⁶ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hal. 17.

²⁷ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 2.

²⁸ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hal. 127.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana suatu hukum bekerja di lingkungan masyarakat.²⁹

Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian socio legal. “Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁰

Metode Penelitian yuridis empiris ini diawali dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Kemudian dilanjutkan dengan observasi secara mendalam dan melakukan penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner untuk mendapatkan data yang diteliti berkaitan dengan implikasi perlindungan hukum indikasi geografis Kopi Liberika Tungkal dan pelaksanaan norma hukumnya apakah sudah sesuai atau tidak di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 12

³⁰ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrii*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 52

Data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang akan diteliti baik yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan alat lainnya merupakan data primer.³¹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data-data dari instansi atau lembaga penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.³²

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³³ Adapun populasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja atau terlibat langsung dalam kegiatan pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya indikasi geografis dan memiliki pengetahuan tentang Kopi Liberika Tungkal.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Kopi Liberika Tungkal, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada Ketua MPIG Kopi Liberika Tungkal dan Ketua Bidang.

³¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.88

³² *Ibid*, hal. 8.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.80.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden.
- b. Studi Pustaka, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

Dari data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan kemudian diseleksi serta dianalisa selanjutnya disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang memuat dan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, yang membahas mengenai perlindungan hukum, pengertian indikasi geografis, dan syarat pendaftaran indikasi geografis.

BAB III Pembahasan, membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan pemanfaatan hak ekonomi dari Kopi Liberika Tungkal dan upaya pemerintah dalam menerapkan perlindungan indikasi geografis Kopi Liberika Tungkal.

BAB IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.